

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Kupang sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya serta dituntut kemandiriannya dalam semua bidang terutama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya serta mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerahnya menurut asas otonomi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah harus bisa menggali potensi yang dimiliki daerahnya. Kemandirian suatu daerah sebagai bentuk keberhasilan penerapan otonomi daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan mendorong kemampuan keuangan daerah dan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap pusat, dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan daerahnya dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan

pemerintah daerah menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, sumber, penggunaan sumber daya ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada suatu periode akuntansi yang disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja keuangan. Susanto (2009:82) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau kemampuan perundang-undangan selama periode anggaran. Selain itu juga dalam penelitiannya mengatakan pengukur kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.

Sularso dan Restianto (2011:110) menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mahmudi (2019:89) menjelaskan penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bagian laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan daerah yang menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi dan anggaran dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu merealisasikan belanja daerah tidak melebihi dari yang dianggarkan dan juga realisasi pendapatan daerah lebih besar dari pada yang dianggarkan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2017-2021, dapat diketahui besarnya Belanja Daerah sebagai pengeluaran daerah Kota Kupang perlu dilihat sebagai pengurangan kas daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Adapun Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Berikut adalah analisis dan tabel belanja daerah dari tahun 2017-2021

$$\text{Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.147.721.807.663,43}{1.286.026.181.285,63} \times 100 \% \\ &= 89,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.167.614.842.066,80}{1.269.506.759.068,13} \times 100 \% \\ &= 91,97\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.168.795.353.636,88}{1.279.638.023.585,70} \times 100 \% \\ &= 91,34\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{1.136.643.267.010,25}{1.197.940.099.855,00} \times 100 \% \\ &= 94,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.100.199.348.375,47}{1.184.901.334.565,00} \times 100 \% \\ &= 92,85\% \end{aligned}$$

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun 2017-2021

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)
2017	1.286.026.181.285,63	1.147.721.807.663,43	89,25%
2018	1.269.506.759.068,13	1.167.614.842.066,80	91,97%
2019	1.279.638.023.585,70	1.168.795.353.636,88	91,34%
2020	1.197.940.099.855,00	1.136.643.267.010,25	94,88%
2021	1.184.901.334.565,00	1.100.199.348.375,47	92,85%

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi dimulai pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Kota Kupang sebesar Rp 1.147.721.807.663,43 atau sebesar 89,25% dari target yang ditentukan. Dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 persentase realisasi belanja daerah menunjukkan persentase yang baik dan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 menunjukan kenaikan dari 91,97%, dan pada tahun 2019 persentase realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari 91,97% menjadi 91,34%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami persentase yang baik dari belanja daerah yaitu realisasi belanja daerah naik dari 91,34% menjadi 94,88%. Namun pada tahun 2021 belanja daerah mengalami penurunan dengan persentase realisasi belanja daerah Kota Kupang turun dari 94,88% menjadi 92,85%. Sehingga dengan demikian jika dilihat dari persentase realisasi belanja daerah pemerintah Kota Kupang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dan dilihat dari realisasi belanja daerah tidak melebihi dari target atau anggaran yang ditentukan.

Penelitian terdahulu oleh : Bahrn Assidiqi (tahun 2016) Dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu : menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dapat dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008-2012, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 11%. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan efisiensi belanja.

Irwan Kosmas dan Wendy (tahun 2022) Dengan judul “Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang” Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu : Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun terakhir (2016-2021). Dari penelitian ini ditemukan bawah tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Kabupaten Bengkayang pada tahun 2017 sangat efektif sedangkan untuk tahun 2019 hingga 2021 dapat dikategorikan efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas tahun 2017 sebesar 105.07% sedangkan untuk tahun 2019 adalah diatas 80%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun 2017 sangat efisien dan untuk tahun 2021 cukup efisien. Ini dilihat dari hasil yang didapat dimana pada tahun 2016 nilai efisiennya 105,53% dan pada tahun 2019 adalah dibawah 80%.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut : Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang jika dianalisis menggunakan Rasio Pertumbuhan Belanja.
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang jika dianalisis menggunakan Rasio Efisiensi Belanja.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang jika dianalisis menggunakan Rasio Efektivitas Belanja.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang jika di analisis menggunakan Rasio Pertumbuhan Belanja.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang jika di analisis menggunakan Rasio Efisiensi Belanja.

3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang jika di analisis menggunakan Rasio Efektivitas Belanja.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitan ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan obyek yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dalam penulisan yang bersifat ilmiah dan wawasan yang luas dalam pengelolaan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Kupang.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk lebih meningkatkan Kinerja Kuangan Belanja Daerah Kota Kupang.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.